



S

E

K

I

NCAU



Trinulan III

2025





Sekincau

Sekincau (Sekilas Kinerja dan Capaian Utama) sebagai buku informasi yang disusun dan dipublikasikan secara berkala kepada para stakeholder secara triwulanan. Sekincau menyampaikan capaian kinerja KPPN Liwa yang utama dan bersifat strategis bagi para stakeholder untuk meningkatkan transparansi pengelolaan APBN KPPN Liwa.

KPPN Liwa, Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34813

✉ kppn/iwa@kemenkeu.go.id

🌐 <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/liwa/id/>

📷 @kppn/iwa

✂ @kppn/iwa

📌 KPPN Liwa

Tim Penyusun

Maria Lucky A.	Saraswati P
Benie Habrian I.	Syahira
Bangkit W.	Mitha Salsabila O
Edy S.	Indah R. Wulandari
Ning Euis	Citra Maharani
M. Verdito Vito	M. Aman Saputra
Dinda Larasati D.	

Foto dan Data

Dokumentasi KPPN Liwa

Our Team



Eddy Suprianto
Kasi PIMS



Ning Euis
Kasi Bank



Bana Habrian
Kasi Verak I



Bangkit Wicakana
Kasubbag Umum



Mitna Sulalbulu D
Pelaksana PIMS



Maria Lucky A
Kepala Kantor



Muri Vardito Uyo
PITM



Syahira
Pelaksana PIMS



Sarawati P Sari
Pelaksana Bank



Citra Miharani
Pelaksana Subbag Umum



Indah R Wulandari
Pelaksana Subbag Umum



Muhi Aman Sahputra
Pelaksana Verak I



Dinda Larasati D
Pelaksana Verak I



TABLE OF CONTENTS

05	Realisasi Belanja K/L	Menampilkan data pagu dan realisasi belanja K/L secara total
07	Komposisi Pagu APBN	Menampilkan data pagu dan realisasi belanja K/L per kabupaten dan jenis belanja
09	PNBP Satker	Menampilkan data jenis PNBP terbesar dan satker dengan PNBP tertinggi di lingkup KPPN Liwa
11	Implementasi Satu	Digipay Menampilkan data implementasi Digipay kerja lingkup KPPN Liwa
12	Transfer ke Daerah	Menampilkan data pagu dan realisasi belanja pmda secara total

14	DAK Fisik	Menampilkan data pagu dan realisasi belanja DAK Fisik per kabupaten
16	DAK Non Fisik	Menampilkan data pagu dan realisasi belanja DAK Non Fisik per kabupaten
18	Dana Desa	Menampilkan data pagu dan realisasi belanja Dana Desa dan Insentif Fiskal per kabupaten
20	Dana Transfer Umum	Menampilkan data pagu dan realisasi belanja DAU dan DBH per kabupaten
22	SPPG	Menampilkan data Program makan bergizi gratis

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Sekilas Kinerja dan Capaian Utama "Sekincau" KPPN Liwa edisi Triwulan III Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan dengan baik. Tujuan penerbitan Sekincau KPPN Liwa ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran umum mengenai kinerja KPPN Liwa dalam penyaluran APBN periode Triwulan III Tahun 2025 yang mencakup pagu dan realisasi belanja pemerintah lingkup Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, PNPB di wilayah kerja KPPN Liwa, penyaluran Transfer ke Daerah serta perkembangannya di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, dan informasi sekilas terkait implementasi Program Prioritas Presiden, yaitu penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung Barat. Dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, kami akan terus berupaya membangun organisasi yang lebih baik dengan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik agar kepercayaan stakeholders khususnya, serta publik pada umumnya, semakin meningkat sesuai janji layanan kami yaitu pelayanan "TRUST" Transparan, Ramah, Utamakan Pelayanan, Sempurna, dan Tanpa Biaya. Harapan kami, edisi Sekincau ini dapat memberikan informasi terkini kepada seluruh stakeholders baik satuan kerja, pemerintah daerah, pihak perbankan, maupun masyarakat terkait dengan pelaksanaan anggaran dan isu prioritas lainnya yang dapat mendukung peningkatan kinerja KPPN Liwa. Akhir pengantar, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyelesaikan penyusunan Sekincau KPPN Liwa ini.

Kepala KPPN Liwa,

Mariva Lucky Ariana

REALISASI BELANJA KL

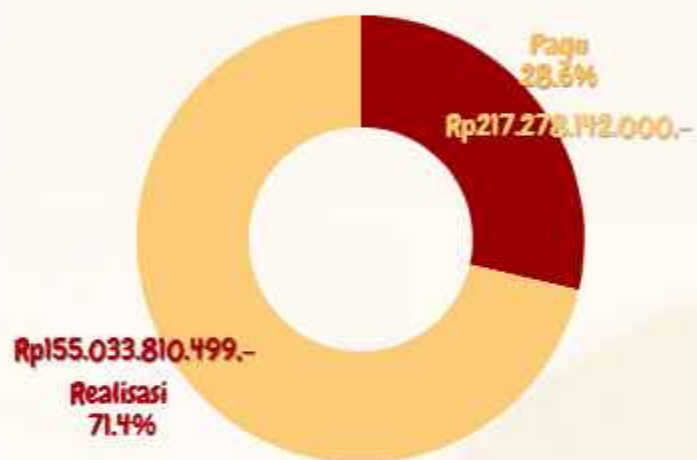


Pelaksanaan realisasi belanja pemerintah Kementerian/Lembaga (K/L) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan kontribusi signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dampak positif APBN terhadap perekonomian nasional antara lain mencakup stabilisasi perekonomian, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pendapatan yang dilakukan secara transparan dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

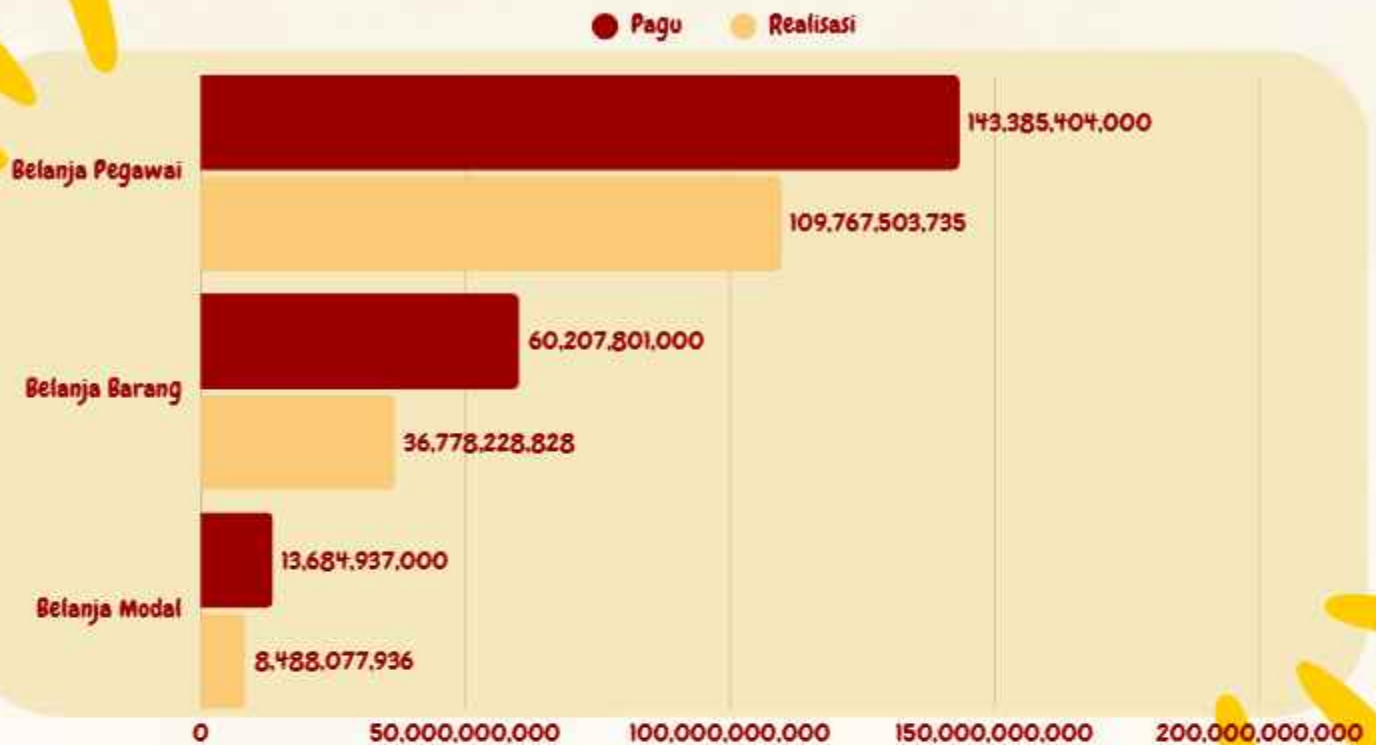
Selain itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa sebagai unit pelaksana penyaluran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berkomitmen untuk mendukung peran tersebut melalui upaya peningkatan kualitas dan realisasi belanja, serta penguatan implementasi kebijakan penyaluran TKD Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini, KPPN Liwa berperan sebagai pengawal keuangan negara di daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan.

Dengan demikian, pelaksanaan realisasi belanja pemerintah K/L yang dibiayai melalui APBN dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, serta mendukung tercapainya tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan realisasi belanja, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Persentase Realisasi Belanja K/L sampai dengan Triwulan III 2025



Pagu dan Realisasi Belanja K/L sampai dengan Triwulan III 2025



Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, total pagu anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp217.278.142.000,- dan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp155.033.810.499,- atau sekitar 71,35% dari total pagu. Dalam rincian belanja, terdapat beberapa kategori yang memiliki realisasi di bawah target yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu belanja dari Eselon 1 K/L.

Belanja Barang, misalnya, mencapai realisasi sebesar Rp36.778.228.828,- atau sekitar 61,09% dari pagu sebesar Rp60.207.801.000,- dengan target realisasi 65% (kebijakan threshold). Demikian pula dengan Belanja Modal, yang hanya mencapai realisasi sebesar Rp8.488.077.936,- atau sekitar 62,02% dari pagu sebesar Rp13.684.937.000,- dengan target realisasi 65% (kebijakan threshold). Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp109.767.503.735,- atau sekitar 76,55% dari pagu sebesar Rp143.385.404.000,-.





Komposisi

Kab. Lampung Barat

Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
402331	Pengadilan Agama Krui	148.500.000	119.508.000	80,48%
641923	Polres Lampung Barat	53.342.417.000	33.243.458.367	62,32%
656731	KPU Kabupaten Lampung Barat	5.413.248.000	4.424.913.142	81,74%
547512	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	32.187.742.000	25.301.898.581	78,61%
547517	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	466.000.000	82.775.000	17,76%
614883	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	4.860.447.000	4.059.316.696	83,52%
614884	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	155.750.000	112.171.400	72,02%
425002	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat	1.159.122.000	989.172.896	85,34%
597715	Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Barat	1.475.601.000	1.106.801.500	75,01%
547514	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	2.156.287.000	1.588.621.000	73,67%
552560	Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat	7.769.572.000	5.473.701.880	70,45%
634572	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Liwa	1.093.019.000	607.193.833	55,55%
539604	Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat	6.070.099.000	3.804.343.103	62,67%
402330	Pengadilan Agama Krui	3.809.054.000	3.134.222.635	82,28%
547519	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	143.118.000	96.893.860	67,70%
547513	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	2.053.501.000	1.418.228.460	69,06%
559932	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	7.825.583.000	6.308.902.115	80,62%

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencapai Rp91.872.122.468,- atau sekitar 70,60% dari total pagu sebesar Rp130.129.060.000,-.

REALISASI JENIS BELANJA



Belanja Barang: Realisasi sebesar Rp20.550.250.862,- atau sekitar 58% dari pagu sebesar Rp35.432.393.146,-.



Belanja Pegawai: Realisasi sebesar Rp66.648.153.969,- atau sekitar 74,50% dari pagu sebesar Rp89.465.056.996,-.



Belanja Modal: Realisasi sebesar Rp3.205.941.710,- atau sekitar 75,55% dari pagu sebesar Rp4.243.275.000,-.

isi APBN



Kab. Pesisir Barat

Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
418180	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	816.792.000	530.252.000	64,92%
418478	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	636.000.000	230.760.000	36,28%
554155	Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat	1.933.909.000	1.581.031.563	81,75%
418408	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	165.104.000	120.575.000	73,03%
689405	Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Barat	5.309.307.000	2.995.245.728	56,42%
121306	KPU Kabupaten Pesisir Barat	5.133.718.000	4.339.841.013	84,54%
692350	Rutan Krui Kelas II B	5.825.907.000	4.115.451.326	70,64%
970106	Polres Pesisir Barat	42.863.023.000	31.686.131.874	73,92%
401837	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	1.238.606.000	742.986.000	59,99%
007350	Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui	3.870.552.000	2.809.714.092	72,59%
418886	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	19.356.164.000	14.009.699.435	72,38%

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mencapai Rp63.161.688.031,- atau sekitar 72,48% dari total pagu sebesar Rp87.149.082.000,-.

REALISASI JENIS BELANJA



Belanja Barang: Realisasi sebesar Rp14.249.950.039,- atau sekitar 57,81% dari pagu sebesar Rp24.649.760.000,-.



Belanja Pegawai: Realisasi sebesar Rp43.639.601.766,- atau sekitar 82,13% dari pagu sebesar Rp53.135.672.000,-.



Belanja Modal: Realisasi sebesar Rp5.272.136.226,- atau sekitar 56,30% dari pagu sebesar Rp9.363.650.000,-.

PNBP

KPPN LINA

wilayah
kerja

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PMK Nomor 58 Tahun 2023, PNBP menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang efektif dan efisien.

Kontribusi PNBP dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia semakin krusial keberadaannya sebagai sumber dana alternatif pengeluaran negara selain perpajakan. Hal ini karena PNBP dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, sehingga dapat membantu membiayai berbagai program pembangunan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan PNBP harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, agar dapat memastikan bahwa sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Barang Milik Negara ←

dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui sewa rumah dinas, gedung, maupun tanah, serta bentuk BMN lainnya.

Hak Negara ←

dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui pendapatan administrasi dan penegakan hukum, seperti yang diterapkan di satker Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.

Pelayanan ←

dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.





JENIS SETORAN PNBP TERTINGGI

1

425919 - Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
Rp4.252.307.386,-

6

425261 - Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Rp418.410.000,-

2

425263 - Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Rp1.805.800.000,-

7

425341 - Pendapatan Pelayanan Pertanahan
Rp380.904.382,-

3

425243 - Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
Rp1.137.015.000,-

8

425273 - Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Rp336.720.000,-

4

425351 - Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
Rp1.058.400.000,-

9

425262 - Pendapatan Perpanjangan Mengemudi (SIM) Surat Izin
Rp314.455.000,-

5

425265 - Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
Rp609.675.000,-

10

425276 - Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu
Rp255.125.000,-

SATKER PNBP TERBESAR

1

641923-Polres Lampung Barat
Rp3.024.621.250,-

2

559932 -Kejaksaan Negeri Lampung Barat
Rp1.329.862.819,-

3

970106 -Polres Pesisir Barat
Rp771.295.000,-

4

547513-Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat
Rp686.955.000,-

5

401837-Kantor Kementerian Agama Kab Pesisir Barat
Rp368.400.000,-

6

539604-Kantor Pertanahan Kab Lampung Barat
Rp264.494.303,-

7

689405-Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat
Rp118.057.943,-

8

656731-KPU Kabupaten Lampung Barat
Rp94.749.820,-



Implementasi Digipay Satu



Penulis: Muhammad Verdito Vigo

Aplikasi Digipay Satu merupakan inovasi Kementerian Keuangan dalam mendukung digitalisasi pembayaran pemerintah. Sistem ini memungkinkan satuan kerja melakukan transaksi non-tunai dengan penyedia barang dan jasa melalui marketplace terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung gerakan cashless government.

Di Kabupaten Lampung Barat, penerapan Digipay Satu menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan data simulasi hingga Triwulan III Tahun 2025, sebanyak 20 dari 28 satuan kerja telah menggunakan aplikasi ini, atau sekitar 72% dari total satker di wilayah tersebut. Sementara delapan satker lainnya masih dalam proses persiapan dan pendampingan teknis.

Perkembangan transaksi juga menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I Tahun 2025 tercatat sekitar 39 transaksi dengan nilai Rp 24,2 juta, meningkat menjadi 82 transaksi senilai Rp 37,24 juta pada Triwulan II. Mengalami sedikit penurunan pada Triwulan III dengan 51 Transaksi senilai 27,7 Juta. Hingga Oktober 2025, volume transaksi telah mencapai 172 transaksi dengan nilai sekitar Rp 89,2 juta. Sebagian besar transaksi dilakukan untuk pengadaan kebutuhan operasional seperti alat tulis kantor, bahan habis pakai, dan jasa pemeliharaan ringan.



SERVICE OFFICER
KPPN LIWA

GAN

Ind

DIGITAL • AKUN

Manfaat penerapan Digipay Satu mulai terasa nyata. Proses belanja pemerintah menjadi lebih cepat dan transparan, karena setiap transaksi tercatat secara elektronik dan mudah dimonitor. Selain itu, sistem ini juga memberi peluang lebih besar bagi UMKM lokal untuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah melalui marketplace resmi.

Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM dalam pengoperasian aplikasi serta kendala jaringan di beberapa wilayah. Untuk mengatasinya, KPPN Liwa terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja serta mendorong pendaftaran penyedia lokal ke dalam sistem marketplace.

Secara keseluruhan, implementasi Digipay Satu di Kabupaten Lampung Barat berjalan dengan baik dan terus berkembang. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan pada akhir tahun 2025 seluruh satuan kerja di wilayah ini dapat sepenuhnya menerapkan Digipay Satu, sehingga pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih efisien, modern, dan transparan.



TRANSFER KE DAERAH



2 KABUPATEN



4.057 KELUARGA
PENERIMA MANFAAT (KPM)



247 DESA



88.57% DARI TOTAL PAGU
KPPN LIWA



ALOKASI PAGU

Lampung Barat dan Pesisir Barat

Tahun 2025, KPPN Liwa memiliki pagu sebesar Rp1.678 miliar untuk memperkuat pembangunan di Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dari total tersebut, Lampung Barat mendapatkan Rp936 miliar, sedangkan Pesisir Barat Rp741 miliar.

Alokasi terbesar, yakni Rp1.051 miliar, dialokasikan untuk Dana Transfer Umum (DTU), yang mendukung pemerataan keuangan daerah dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah. Sementara itu, alokasi DAK Fisik dan Nonfisik masing-masing sebesar Rp128 miliar dan Rp267 miliar untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana fisik layanan dasar, serta pendanaan operasional layanan publik di kedua kabupaten. Dana Desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp230 miliar juga dialokasikan untuk peningkatan kemandirian desa di kedua kabupaten, serta mendorong kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan tata kelola APBD.

PAGU PER JENIS TKD

Kategori	Lampung Barat	Pesisir Barat	Total
DAK Fisik	84.125.305.000	44.536.354.000	128.661.659.000
DAK Non Fisik	157.873.174.000	110.063.568.000	267.936.742.000
Dana Desa & Insentif Fiskal	120.471.186.000	109.528.965.000	230.000.151.000
Dana Transfer Umum	574.335.490.000	477.110.069.000	1.051.445.559.000
Total	936.805.155.000	741.238.956.000	1.678.044.111.000

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025



Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan earmarking DAU, meningkatkan efektivitas DAK, dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah



Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah



Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas



Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera

DAK FISIK

TRIWULAN III 2025

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan infrastruktur daerah, membuka akses baru bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya, DAK Fisik membantu meningkatkan konektivitas antar-daerah, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Melalui program-program yang tepat sasaran, DAK Fisik menjadi investasi bagi kemajuan daerah, mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, DAK Fisik tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membawa dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Fokus kebijakan DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 ialah DAK Fisik Layanan Dasar, Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN), Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri. Pagu DAK Fisik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp84.125.305.000,-.

BERIKUT RINCIAN PAGU DAK FISIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT PER SUBBIDANG:

No	Sub Bidang	Pagu	Realisasi	%
1	PAUD	988.172.000	987.928.205	99.98
2	SD	214.449.000	210.355.798	98.09
3	SMP	234.277.000	227.794.000	97.23
4	Keluarga Berencana	3.210.000.000	1.372.000.000	42.74
5	Penguatan Sistem Kesehatan	38.171.459.000	13.285.697.231	34.81
6	Jalan *)	27.298.352.000	-	-
7	Irigasi *)	4.675.976.000	-	-
8	Air Minum	4.219.044.000	2.932.650.000	69.51
9	Sanitasi	5.113.576.000	3.579.503.200	70.00

Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat efisiensi pagu baik pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. Subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik yang terdampak efisiensi adalah Subbidang Jalan dan Irigasi.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 realisasi DAK Fisik di wilayah Kabupaten Lampung Barat telah mencapai Rp22.595.928.434 atau sekitar 43.33% dari total pagu. Sementara DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi sampai dengan berakhirnya triwulan III belum terdapat realisasi dikarenakan telah ditetapkan KMK Nomor 29 Tahun 2025.

*) Jenis DAK Fisik yang terdampak Efisiensi Belanja Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025

Pagu DAK Fisik untuk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebesar Rp44.536.354.000,- yang terbagi menjadi 5 subbidang DAK Fisik Penugasan, antara lain Subbidang SD, Penguatan Sistem Kesehatan, Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. Sampai dengan triwulan III 2025 realisasi DAK Fisik di wilayah Kabupaten Pesisir Barat telah mencapai Rp2.850.406.093,- atau sekitar 21,69% dari total pagu. Sama seperti Kabupaten Lampung Barat, belum ada realisasi penyaluran DAK Fisik pada Subbidang Jalan dan Irigasi akibat adanya efisiensi anggaran Tahun 2025 sesuai ketentuan dalam KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

BERIKUT RINCIAN PAGU DAK FISIK KABUPATEN PESIR BARAT PER SUBBIDANG:

Subbidang SD

Pagu : Rp207.928.000,-
Realisasi : Rp199.865.968,-



Subbidang Air Minum

Pagu : Rp4.473.470.000,-
Realisasi : Rp1.118.367.375,-

Penguatan Sistem Kesehatan

Pagu : Rp4.955.904.000,-
Realisasi : Rp656.250.000,-



Subbidang Sanitasi

Pagu : Rp3.503.691.000,-
Realisasi : Rp875.922.750,-

Subbidang Jalan *)

Pagu : Rp30.639.819.000,-
Realisasi : -



Penguatan Irigasi *)

Pagu : Rp755.542.000,-
Realisasi : -

Meningjau dari pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun sebelumnya, diperlukan perbaikan strategis antara lain, perlu dilakukan peningkatan realisasi DAK Fisik dengan memastikan penyaluran dana tepat waktu dan efektif. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan dan evaluasi rutin serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan juga perlu ditingkatkan.

DAK NON FISIK

TRIWULAN III 2025

Tak hanya membangun daerah dari infrastruktur, DAK Non Fisik, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah melalui alokasi dana yang tidak bersifat fisik, menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberdayakan masyarakat, sehingga kesenjangan antar-daerah dapat dikurangi dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan DAK Non Fisik Lainnya. DAK Non Fisik membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkeadilan dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Melalui program-program yang tepat sasaran, DAK Non Fisik menjadi investasi bagi kemajuan daerah, membuka peluang baru bagi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, perlu dibuat rencana strategis jangka panjang yang mempertimbangkan analisis dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan dana. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat dapat berjalan efektif dan optimal.

Dari setiap jenis DAK Nonfisik tersebut, **Pagu Kabupaten Lampung Barat** terbagi menjadi:

Dana BOSP

Pagu : Rp42.693.170.000,-
Realisasi : Rp42.227.980.696,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Pagu : Rp85.439.358.000,-
Realisasi : Rp42.862.063.400,-

Dana BOK

Pagu : Rp23.165.926.000,-
Realisasi : Rp17.863.779.358,-

DAK Nonfisik Lainnya

Pagu : Rp6.574.720.000,-
Realisasi : Rp3.287.360.000,-

Dana BOSP :

BOS : Rp38.653.410.000,-
BOP PAUD : Rp2.898.110.000,-
BOP Kesetaraan : Rp1.141.650.000,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah:

TPG ASN Daerah : Rp84.172.228.000,-
Tamsil Guru ASN Daerah : Rp905.000.000,-
TKG ASN Daerah : Rp362.130.000,-

Dana BOK:

BOK Dinas : Rp8.752.037.000,-
BOK Puskesmas : Rp14.021.783.000,-
BOK Pengawasan Obat dan Makanan :
Rp392.106.000,-

DAK Nonfisik Lainnya:

Rp6.574.720.000,-

**Dana BOSP**

Pagu : Rp28.388.311.000,-

Realisasi : Rp28.372.678.900,-

**Dana Tunjangan Guru ASN Daerah**

Pagu : Rp60.412.253.000,-

Realisasi : Rp29.247.682.100,-

**Dana BOK**

Pagu : Rp 17.110.114.000,-

Realisasi : Rp9.642.133.357,-

**DAK Nonfisik Lainnya**

Pagu : Rp4.152.890.000,-

Realisasi : Rp4.089.050.000,-

Dari setiap jenis DAK Nonfisik tersebut, **Pagu Kabupaten Pesisir Barat** terbagi lagi menjadi:

Dana BOSP :

BOS : Rp26.028.026.000,-

BOP PAUD : Rp2.095.805.000,-

BOP Kesenjangan : Rp264.480.000,-

Dana BOK:

BOK Dinas : Rp8.370.145.000,-

BOK Puskesmas : Rp8.739.969.000,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah:

TPG ASN Daerah : Rp55.800.801.000,-

Tamsil Guru ASN Daerah : Rp845.750.000,-

TKG ASN Daerah : Rp3.765.702.000,-

DAK Nonfisik Lainnya:

Rp4.152.890.000,-

Adapun untuk DAK Non Fisik Lainnya pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat ditujukan untuk Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG).

Dalam keseluruhan, data DAK Nonfisik Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan bahwa pengelolaan dana relatif efektif. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti keterlambatan penyaluran dana. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan strategis, seperti perkuat koordinasi dan pengembangan kapasitas SDM dalam pemenuhan percepatan syarat untuk penerbitan rekomendasi.

Nuwo Sesat

Ciri k

Rumah Adat Nuwo Sesat adalah rumah adat Khas Provinsi Lampung yang memiliki makna filosofis mendalam sebagai simbol identitas masyarakat Lampung. Nama **"Nuwo Sesat"** berarti **"Rumah Balai Agung"** yang menunjukkan fungsi rumah ini sebagai tempat musyawarah dan kegiatan adat masyarakat.

Nuwo Sesat adalah rumah panggung yang mencerminkan adaptasi masyarakat Lampung terhadap lingkungan tropis, terutama untuk melindungi dari banjir dan hewan liar. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan adat dan budaya masyarakat Lampung.

◆ Struktur:

Rumah ini dibangun di atas tiang dengan ketinggian sekitar 1,5 hingga 2 meter dari tanah untuk menghindari banjir dan kelembapan tanah. Bahan bangunan rumah ini dibuat dari kayu lokal seperti kayu tembesu atau kayu meranti, dengan atap dari daun nipah atau ijuk. Bentuk atap rumah berbentuk limas atau pelana, dengan ujung runcing yang mencerminkan nilai estetika dan fungsional.

◆ Tata Ruang:

- Serambi Depan (Sesat Balai): digunakan sebagai tempat menerima tamu atau musyawarah adat.
- Ruang Utama: berfungsi sebagai tempat menerima tamu/tempat musyawarah adat.
- Ruang Belakang: digunakan untuk dapur dan penyimpanan barang.
- Tangga depan: biasanya dihiasi ornamen khas yang disebut singei (mencerminkan kekayaan budaya Lampung)



khass:

◆ Ornamen:

Nuwo Sesat dihiasi dengan ukiran khas Lampung yang bermotif flora, fauna, atau pola geometris yang melambangkan harmoni dan kearifan lokal.

◆ Makna Filosofis:

Nuwo Sesat memiliki nilai-nilai filosofis yang mencerminkan kehidupan masyarakat Lampung:

- Gotong Royong: Rumah ini mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam musyawarah dan kerja sama.
- Keseimbangan dengan Alam: Struktur rumah panggung menunjukkan harmoni masyarakat Lampung dengan alam sekitar.
- Keagungan Budaya: Ornamen dan tata ruang rumah mencerminkan keagungan tradisi dan nilai-nilai adat masyarakat Lampung.
- Simbol Hierarki Sosial: Nuwo Sesat menjadi simbol status sosial masyarakat adat Lampung.

◆ Fungsi dalam kehidupan sehari-hari

I Pusat Kegiatan Adat

Rumah ini digunakan untuk pelaksanaan musyawarah adat, upacara pernikahan, dan berbagai acara budaya lainnya.

II Tempat Tinggal

Sebagian Nuwo Sesat juga berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar masyarakat adat.

III Penyimpanan Barang

Ruang belakang dan kolong rumah dimanfaatkan untuk menyimpan hasil bumi atau barang-barang keperluan rumah tangga.

IV Pelestarian Budaya

Nuwo Sesat menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Lampung yang diwariskan dari generasi ke generasi.

V Daya Tarik Wisata

Sebagai salah satu ikon budaya Lampung, Nuwo Sesat kini menjadi daya tarik wisata yang menarik wisatawan untuk mengenal lebih dekat budaya Lampung.

Sumber: www.indonesia.travel.com



DANA DESA INSENTIF FISKAL TRIWULAN III 2025

Dana Desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta untuk Bantuan Langsung Tunai. Dengan alokasi dana yang tepat sasaran, desa-desa dapat membangun infrastruktur dasar yang memadai, membiayai kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif. Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditujukan untuk mendorong peningkatan dan kemandirian desa dan kualitas tata kelola dana desa, meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi dan mengarahkan fokus penggunaan dana desa melalui penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, operasional pemerintah desa, program sektor prioritas lainnya di desa yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah akan menyalurkan Dana Desa ke 131 desa di Kabupaten Lampung Barat dan 116 desa di Kabupaten Pesisir Barat. Realisasi penyaluran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp156,02 miliar yaitu mencapai 75,56 persen dari total pagu sebesar Rp206,49 miliar.

Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Non-Earmark untuk tahap 1 dan tahap 2 di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

1	Lampung Barat		Pesisir Barat	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
	31.145.406.770	31.145.406.770	21.992.259.074	21.992.259.074

2	Lampung Barat		Pesisir Barat	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
	31.120.736.930	12.281.495.890	30.304.453.516	17.433.231.096

Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Earmark di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

1 Lampung Barat		Pesisir Barat	
Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
30.314.001.780	30.314.001.780	24.840.649.446	24.840.649.446

2 Lampung Barat		Pesisir Barat	
Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
20.209.334.520	8.436.087.740	16.560.432.964	9.579.857.804

Selain menyalurkan Dana Desa, pemerintah juga memberikan dukungan tambahan kepada daerah melalui Dana Insentif Fiskal. Insentif Fiskal (IF) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dukungan ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memberikan manfaat insentif fiskal yang signifikan bagi daerah.

Kebijakan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 antara lain pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan pencapaian target prioritas nasional, mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

Total pagu Insentif Fiskal yang dikelola KPPN Liwa yaitu Rp23.470.765.000,- untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp7.639.595.000,- dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp15.831.170.000,-. Sampai dengan akhir triwulan III 2025 total realisasi dana insentif fiskal sebesar Rp15.555.180.000,-.

Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal



DANA TRANSFER UMUM

TRIWULAN III 2025

Dana Transfer Umum menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah, yang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kunci penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Dengan alokasi yang adil dan transparan, DAU membuka peluang bagi daerah-daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

Kebijakan Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2025 antara lain melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan holdharmless sampai tahun 2027; memperkuat penggunaan earmarking DAU; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan dan kemampuan keuangan antara daerah-daerah; meningkatkan kualitas tata kelola earmarking DAU ; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui penyesuaian bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU, serta melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

Total Pagu DAU yang dikelola KPPN Liwa yaitu Rp1.017.206.747.000,- yang terdiri dari Rp557.369.982.000,- untuk Kabupaten Lampung Barat dan Rp459.836.765.000,- untuk Kabupaten Pesisir Barat. Total dana tersebut dialokasikan untuk DAU Block Grant dan DAU Spesific Grant.

Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat efisiensi pagu DAU untuk jenis Dukungan bidang Pekerjaan Umum masing-masing sebesar Rp20.625.017.000,- pada Kabupaten Lampung Barat dan Rp26.369.919.000,- pada Kabupaten Pesisir Barat.

Total penyaluran realisasi DAU di KPPN Liwa sampai dengan Triwulan III 2025 mencapai 80,63% untuk Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar Rp440.154.705.244,- untuk Kabupaten Lampung Barat dan Rp342.096.685.978,- untuk Kabupaten Pesisir Barat.

Dari setiap jenis DAU pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat terbagi lagi menjadi:

Kabupaten Lampung Barat

- BG : Rp474.740.845.000,-
- Formasi PPPK : Rp6.481.554.000,-
- Kelurahan : Rp1.000.000.000,-
- Pendidikan : Rp32.897.621.000,-
- Kesehatan : Rp21.624.945.000,-
- PU : Rp20.625.017.000,- *)

Kabupaten Pesisir Barat

- BG : Rp339.914.455.000,-
- Formasi PPPK : Rp24.114.168.000,-
- Kelurahan : Rp400.000.000,-
- Pendidikan : Rp43.593.625.000,-
- Kesehatan : Rp25.444.598.000,-
- PU : Rp26.369.919.000,- *)

*) Jenis DAU yang terdampak Efisiensi Belanja Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025

Selain Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil (DBH), yang menjadi bagian Dana Transfer Umum, dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH menjadi katalisator penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan, DBH membuka pintu bagi daerah-daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, membiayai proyek-proyek pembangunan yang inovatif, dan meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif.

Dana Bagi Hasil (DBH) di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1. **DBH Pajak:** Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan penerimaan pajak yang dihasilkan oleh daerah tersebut.
2. **DBH Sumber Daya Alam (SDA):** Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral.
3. **DBH Sawit:** Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan royalti perkebunan kelapa sawit.

Sampai dengan akhir Triwulan III ini, penyaluran DBH lingkup KPPN Liwa mencapai 61,46% dari total pagu Rp35.910.356.000,-. Realisasi untuk dua kabupaten yaitu sebesar Rp22.072.205.700,- dengan rincian untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp10.839.192.400,- dan untuk Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp11.233.013.300,-.

Dari setiap jenis DBH tersebut pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat terbagi lagi menjadi:

Lampung Barat:

- PPh Pasal 21 : Rp5.068.059.000,-
- PPh Pasal 25/29 : Rp228.944.000,-
- PBB : Rp2.189.101.000,-
- SDA Minyak Bumi : Rp4.218.284.000,-
- Pertambangan Umum - Iuran Tetap : Rp157.434.000,-
- Pertambangan Umum - Royalti : Rp31.000,-
- SDA Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah : Rp2.154.787.000,-
- SDA Panas Bumi-Iuran Tetap : Rp6.005.000,-
- SDA Kehutanan : Rp133.594.000,-
- SDA Perikanan : Rp851.176.000,-
- CHT : Rp124.325.000,-
- Sawit : Rp1.833.768.000,-

Pesisir Barat:

- PPh Pasal 21 : Rp4.390.727.000,-
- PPh Pasal 25/29 : Rp200.473.000,-
- PBB : Rp2.289.953.000,-
- SDA Minyak Bumi : Rp4.218.284.000,-
- Pertambangan Umum - Iuran Tetap : Rp2.009.000,-
- Pertambangan Umum - Royalti : Rp31.000,-
- SDA Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah : Rp2.154.787.000,-
- SDA Panas Bumi-Iuran Tetap : Rp6.005.000,-
- SDA Kehutanan : Rp43.727.000,-
- SDA Perikanan : Rp1.751.439.000,-
- CHT : Rp119.826.000,-
- Sawit : Rp2.096.043.000,-

Program Makanan Bergizi Gratis

Penulis : Saraswati Permita Sari



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sekadar program, melainkan sebuah intervensi gizi berbasis kesehatan masyarakat yang masif dan terstruktur. Dipimpin oleh Badan Gizi Nasional (BGN), program ini direncanakan bergulir penuh pada tahun 2025 dengan target mencapai 17,5 juta jiwa penerima manfaat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang akan menjadi pondasi utama kemajuan bangsa. Penelitian menunjukkan bahwa gizi yang optimal sangat penting untuk perkembangan otak, konsentrasi, dan prestasi akademik anak. Sebaliknya, malnutrisi dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan terhadap kesehatan dan produktivitas ekonomi.

Program MBG oleh BGN, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendorong pola makan gizi seimbang bagi kelompok sasaran. Program tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan di beberapa titik pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Di wilayah Kabupaten Lampung Barat sendiri SPPG yang sudah berstatus running dalam memberikan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis adalah SPPG Lampung Barat Balik Bukit Sebarus. SPPG tersebut telah berjalan sejak 19 Agustus 2025 dan telah melayani penyediaan paket MBG sebanyak 3.743 porsi setiap hari.

Dalam hal logistik, waktu tempuh terlama untuk distribusi makanan oleh SPPG Sebarus ke penerima manfaat hanya 15 menit.

Struktur ketenagakerjaan SPPG ini melibatkan total 47 pekerja juru masak selain Kepala SPPG, ahli gizi, dan administrasi. Sementara upah minimum yang diberikan kepada pekerja per hari rata-rata adalah Rp100.000. Dalam hal pengadaan, jumlah pembelian/belanja bahan baku per minggu (dihitung untuk 12 hari) mencapai Rp663.948.000. Sumber pembelian bahan baku utama berasal dari dalam kota.

Proses penyiapan makanan dimulai pada Jam 01.00 WIB (Dini Hari). Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, telah dilakukan uji sampel makanan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada penerima manfaat dan dilakukan oleh tiga pihak yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Juru Masak. Sumber air yang digunakan untuk pencucian alat makan (ompreng) adalah Sumur Bor. Hingga saat ini, dilaporkan bahwa tidak pernah ada kasus keracunan yang menyebabkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan tidak ada kendala dalam penyiapan makanan dalam jumlah besar.



SPPG Lampung Barat Balik Bukit Sebarus telah menggunakan perlengkapan yang memadai dan sesuai standar ditetapkan oleh BGN yang mencakup 96 item seperti Rice Timer, Freezer, Chiller, Kualiti Ring, Pengatur Suhu, Talenan dan Pisau yang berbeda untuk setiap jenis bahan makanan, Food Tray, dan Water boiling, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, SPPG tersebut masih mengalami beberapa kendala seperti:

- **Kebutuhan Pedoman Teknis:** Dibutuhkan petunjuk teknis (juknis) yang lebih mudah dipahami oleh pihak SPPG.
- **Pengadaan Bahan Baku:** Kesulitan mendapatkan bahan baku basah, khususnya ikan fillet, di Lampung Barat yang menghambat upaya variasi menu dan pemenuhan gizi setiap harinya.
- **Kualifikasi SDM:** Keterbatasan chef/koki yang ada di Lampung Barat yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam juknis.
- **Mekanisme Pengaduan:** Tidak adanya sarana pengaduan formal bagi SPPG apabila menemui kendala/kesulitan; selama ini pelaporan hanya dilakukan kepada Korwil.
- **Koordinasi:** Diperlukan wadah kolaborasi yang terstruktur dengan Satgas.



Adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program prioritas ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan evaluasi untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan kedepannya terkait pelaksanaan program MBG.

Selanjutnya, harapan paling mendasar dari terlaksananya program ini adalah anak-anak, termasuk ibu hamil dan menyusui yang juga menjadi sasaran, bisa mendapatkan asupan gizi seimbang -

yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, mengurangi masalah gizi buruk dan stunting. Selain itu, Program ini diharapkan dapat memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dengan membeli bahan pangan dari mereka, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar.



KPPN LIWA



Juli - September 2025



HUT Kabupaten Lampung Barat



Rapat Tinjauan Manajemen



Kegiatan Satu Kemenkeu bersama KPKNL Bandar Lampung



Audiensi Kakanwil DJPb Lampung dengan Pemda Kabupaten Lampung Barat





Perpisahan Pegawai Mutasi



Sinergi dengan Forkopimda



Kunjungan Kabid Keuangan Polda Lampung



Kunjungan BPJS Kesehatan



Forum Konsultasi Publik



Stakeholder's Day & Press Release APBN



Kunjungan Bank BSI KCP Liwa



Money Pelaksanaan Anggaran



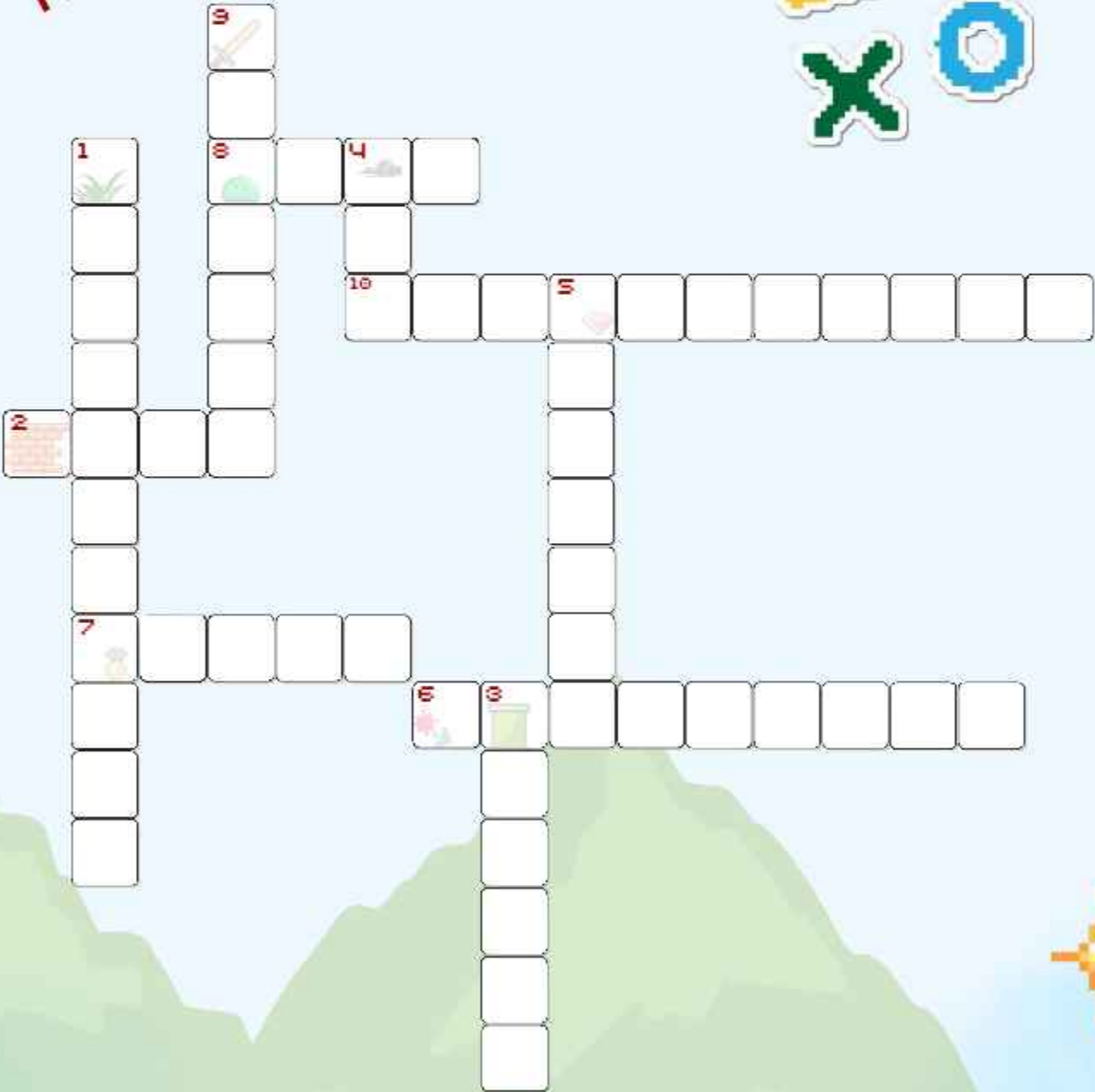
Pemberdayaan UMKM



Capacity Building Triwulan III 2025

ttt\$?

TEKA TEKI SEKINCAU





MENURUN

- 1 Salah satu inovasi Kementerian Keuangan dalam mendukung digitalisasi pembayaran
- 3 Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu disebut Dana Insentif
- 4 Salah satu jenis DAK Non Fisik
- 5 Subbidang infrastruktur DAK pembangunan FISIK untuk ketahanan pangan
- 9 Nama alat makan pada program Makan Bergizi Gratis

MENDATAR

- 2 Unit operasional pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
- 7 Rumah adat Lampung
- 8 Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 10 Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kunci penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah



kirim jawabanmu ke email
kppn145@gmail.com



Dapatkan hadiah menarik untuk
1 orang pemenang





SEKINCAU